



4.78%

SIMILARITY OVERALL

SCANNED ON: 3 JUL 2024, 2:51 PM

Similarity report

Your text is highlighted according to the matched content in the results above.

● CHANGED TEXT
4.78%

Report #21900065

B-1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kerja Profesi Pengembangan dan implementasi sistem informasi (SI) telah menjadi penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi. Sistem informasi memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan penyebaran informasi, sehingga memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang tepat, mengoptimalkan proses, dan meningkatkan komunikasi antar berbagai departemen (Pearlson, Saunders, & Galletta, 2021). Penggunaan SI mencakup berbagai sektor, termasuk kesehatan, keuangan, pendidikan, dan manufaktur, masing-masing mendapatkan manfaat dari solusi yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik industri (Turban, Pollard, & Wood, 2021). Misalnya, di sektor kesehatan, sistem informasi meningkatkan perawatan pasien melalui rekam medis elektronik dan telemedicine, sementara di sektor keuangan, mereka memperlancar pemrosesan transaksi dan manajemen risiko (O'Brien & Marakas, 2021). Integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, analitik big data, dan komputasi awan semakin memperkuat kemampuan sistem informasi, mendorong inovasi dan keunggulan kompetitif di era digital (Rainer et al., 2022; Bourgeois & Smith, 2021). Sistem politik di Indonesia adalah demokrasi perwakilan dengan sistem presidensial, di mana Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan dalam struktur politiknya sejak merdeka dari Belanda pada

tahun 1945, mulai dari sistem parlementer hingga beralih ke sistem presidensial pada era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan liberalisasi politik, desentralisasi kekuasaan, dan penguatan institusi demokrasi setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini diatur oleh UUD 1945. UUD 1945 adalah konstitusi atau hukum dasar yang dimiliki Indonesia, telah mengalami beberapa kali amandemen untuk memperkuat mekanisme checks and balances serta menjamin hak asasi manusia (Sukma, 2019).

3 Lembaga legislatif Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang bersama-sama membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung setiap lima tahun untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, dan anggota legislatif, dan sejak era reformasi, pemilu di Indonesia dianggap semakin bebas dan adil, dengan partisipasi politik yang lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat (Muhtadi, 2019). Selain itu, otonomi daerah yang diterapkan sejak tahun 2001 telah memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, memperkuat desentralisasi dan demokrasi di tingkat lokal (Firman, 2020). Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam sistem politiknya, termasuk korupsi, politik uang, dan polarisasi politik (Harsono, 2019). Pada Februari 2024 ini akan dilakukan pemilu serentak di seluruh Indonesia.

1 Dalam kesempatan ini diselenggarakan pemilihan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota dan provinsi. Tahapan pemilu dimulai pada Juni 2022, pemungutan suara pada 14 Februari 2024, sampai paling akhir adalah Pengucapan Sumpah sekaligus pelantikan Presiden dan Wakil Presiden baru pada Oktober 2024. (PKPU No 3 Tahun 2022). Wilayah pemilihan mencakup 38 provinsi, termasuk 3 provinsi baru di Papua, secara total ada 2.748 daerah pemilihan terdiri dari daerah pemilihan untuk calon anggota

DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

(infopemilu.kpu.go.id, 2023). Sistem informasi politik di Indonesia memainkan peran penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses politik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini memungkinkan akses yang lebih luas dan cepat terhadap data dan informasi politik, mulai dari hasil pemilu, kebijakan publik, hingga aktivitas legislatif. Sistem informasi politik juga mendukung e-governance, yang meningkatkan interaksi antara pemerintah dan warga negara melalui platform digital, serta memungkinkan partisipasi yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan politik. Di era digital ini, berbagai inisiatif seperti portal keterbukaan informasi publik, aplikasi pengawasan pemilu, dan platform partisipasi publik online telah diimplementasikan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia (Nugroho, 2021). Meski demikian, tantangan seperti keamanan data, privasi, dan ketimpangan akses teknologi masih perlu diatasi untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam penggunaan sistem informasi politik (Putra & Hidayat, 2022). Aplikasi web adalah program yang dapat diakses melalui peramban web dan berfungsi di dalam lingkungan web server. Aplikasi ini memainkan peran penting dalam era digital saat ini, memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai layanan dan informasi secara online tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan di perangkat mereka. Aplikasi web mencakup berbagai jenis layanan, mulai dari media sosial, e-commerce, perbankan online, hingga sistem manajemen konten. Pengembangan aplikasi web umumnya melibatkan teknologi seperti HTML, CSS, dan JavaScript di sisi klien, serta bahasa pemrograman seperti Python, PHP, dan Java di sisi server. Keunggulan utama aplikasi web adalah aksesibilitasnya yang mudah, pemeliharaan yang lebih sederhana, dan kemampuan untuk diperbarui secara real-time tanpa memerlukan tindakan dari pengguna (Wijaya, 2021). Namun, tantangan seperti keamanan data, kinerja, dan kompatibilitas lintas peramban tetap menjadi perhatian utama dalam pengembangan dan penerapan aplikasi web (Saputra, 2022).

8 1.2

Maksud dan Tujuan Kerja Profesi 1.2 1 Maksud Kerja Profesi Maksud dari kerja

profesi untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki praktikan dalam bidang pengetahuan sistem informasi mencapai hasil yang diinginkan. 1.2.2 Tujuan Kerja Profesi Tujuan dari kerja profesi untuk memberikan kontribusi yang bermakna dalam bidang pekerjaan tertentu, baik melalui penyediaan layanan, solusi terhadap masalah, atau peningkatan kualitas dalam konteks kerja. 1.3 Tempat Kerja Profesi Kerja profesi studi independen dilakukan di lingkungan domisili penulis yaitu di RT 05 RW 06 Desa Cikande, Kecamatan Cikande Kabupaten Serang. 1.4 Jadwal Pelaksanaan Kerja Profesi Kerja profesi studi independen dilakukan 50 hari kerja(10 Pekan) mulai dari tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan 23 Februari 2024. B-3 BAB II TINJAUAN UMUM OBYEK PENELITIAN 2.1 Pemilu 2024 Pemilu Indonesia 2024 adalah tonggak penting dalam perjalanan demokrasi negeri ini, di mana rakyat akan secara langsung memilih pemimpin di semua tingkat pemerintahan, baik nasional maupun daerah. **1 2** Pemilu ini meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota. Diharapkan, melalui proses demokratis ini, terpilihlah pemimpin-pemimpin yang mampu membawa kemajuan signifikan dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan Pemilu 2024 diwarnai dengan berbagai dinamika politik, termasuk kampanye para calon yang berkompetisi untuk meraih dukungan rakyat. Kampanye ini menjadi ajang bagi para calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja mereka. Media massa dan media sosial juga berperan penting dalam menyebarkan informasi terkait pemilu, memungkinkan masyarakat untuk lebih mengenal calon pemimpin mereka. Selain itu, pemilu kali ini dihadapkan pada tantangan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan jujur, adil, dan transparan di tengah situasi yang mungkin masih dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Partisipasi aktif masyarakat sangat diharapkan dalam Pemilu 2024, karena suara mereka akan menentukan arah pembangunan bangsa lima tahun ke depan. Keterlibatan masyarakat dalam memilih secara cerdas dan bertanggung jawab menjadi kunci suksesnya

pemilu ini. Oleh karena itu, berbagai upaya edukasi pemilih terus digalakkan, termasuk melalui sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berbagai organisasi masyarakat sipil. Harapannya, Pemilu 2024 tidak hanya menjadi pesta demokrasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat sistem politik dan pemerintahan yang demokratis di Indonesia.

2.2 Lembaga Legislatif di Indonesia Tingkat Nasional: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

1. Anggota: Dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun. 2. Fungsi Utama:

- Legislasi: Penyusunan dan pengesahan undang-undang.
- Anggaran: Pembahasan dan persetujuan anggaran negara.
- Pengawasan: Pengawasan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah.

3. Kerja Sama: Bekerja sama dengan Presiden dalam penyusunan undang-undang.

Tingkat Provinsi: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi)

1. Anggota: Dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun. 2. Fungsi Utama:

- Legislasi: Pembuatan peraturan daerah (Perda).
- Anggaran: Penyetujuan anggaran daerah.
- Pengawasan: Pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat provinsi.

3. Kerja Sama: Bekerja sama dengan Gubernur dalam menjalankan fungsi legislatif.

Tingkat Kabupaten/Kota: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten/Kota)

1. Anggota: Dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun. 2. Fungsi Utama:

- Legislasi: Pembuatan peraturan daerah (Perda).
- Anggaran: Penyetujuan anggaran daerah.
- Pengawasan: Pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat kabupaten/kota.

3. Kerja Sama: Bekerja sama dengan Bupati atau Wali Kota dalam menjalankan fungsi legislatif.

Tingkat Nasional: Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

1. Anggota: Dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. 2. Fungsi Utama:

- Pertimbangan dan Usulan: Memberikan rekomendasi dan usulan terkait rancangan undang-undang yang berhubungan dengan daerah.
- Pengawasan: Memantau pelaksanaan undang-undang terkait otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta keseimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

3. Peran: Memastikan kepentingan daerah diperhatikan dalam proses legislatif di tingkat nasional.

2.3 Tahapan Pemilu 2024

Tahapan	Jadwal
2.1 Tahapan Pemilu	JADWAL TAHAPAN 14 Juni 2022 - 14 Juni 2024

Menyusun dan merancang program serta alokasi anggaran untuk seluruh proses pemilu 14 Juni 2022 - 14 Desember 2023 Merancang dan menetapkan peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum yang akan digunakan selama pemilu 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023 Mengupdate dan menyusun daftar pemilih yang valid dan akurat 29 Juli 2022 - 13 Desember 2022 Menerima dan memverifikasi pendaftaran peserta pemilu, baik partai politik maupun calon independen 14 Desember 2022 - 14 Februari 2022 Menetapkan peserta resmi yang berhak mengikuti pemilu setelah melalui proses verifikasi 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023 Menetapkan jumlah kursi yang tersedia dan menentukan daerah pemilihan 6 Desember 2022 - 25 November 2023 Proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah 24 April 2023 - 25 November 2023 Proses pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota 19 Oktober 2023 - 25 November 2023 Proses pencalonan kandidat Presiden dan Wakil Presiden 28 November 2023 - 10 Februari 2024 Periode di mana para peserta pemilu melakukan kampanye untuk menarik dukungan dari pemilih 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024 Periode di mana segala bentuk kampanye dihentikan untuk memberikan waktu tenang bagi pemilih sebelum pemungutan suara 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024 Proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024 Proses rekapitulasi hasil perhitungan suara dari seluruh tempat pemungutan suara disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota Pelantikan anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan akhir masa jabatan masing-masing disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi Pelantikan anggota DPRD provinsi sesuai dengan akhir masa jabatan masing-masing 1 Oktober 2024 Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah 20 Oktober 2024 Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih

B-1 BAB III PELAKSANAAN KERJA
PROFESI 3.1 Bidang Kerja Praktikan melakukan perencanaan, dokumentasi, penelitian terhadap obyek penelitian terkait pengembangan aplikasi web

sistem informasi pemilu. Praktikan melakukan perancangan, mengkaji sumber data resmi yang ditemukan, dan memilih metode yang cocok untuk memenuhi kebutuhan dari tujuan aplikasi ini digunakan. Sumber data yang dicari adalah mengenai desain surat suara, daerah pemilihan, wilayah administrasi di Indonesia, serta basis data calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Produk yang dihasilkan berupa aplikasi web yang dapat digunakan dan menjawab kebutuhan sasaran pengguna, yaitu calon pemilih yang ada di Indonesia mengenai sistem yang lebih bisa diakses dan ramah bagi pengguna dibandingkan sistem yang sudah ada milik penyelenggara negara dalam hal ini komisi pemilihan umum (KPU). 3.2 Pelaksanaan Kerja Dalam pelaksanaannya, praktikan melakukan riset dan pengembangan secara terus menerus untuk menjaga supaya produk yang dikembangkan tetap relevan. Praktikan melakukan riset informasi dari media-media online yang kredibel dan pada akhirnya menjadikan website KPU sebagai sumber data satu-satunya yang diambil. Praktikan mengambil data calon legislatif dari website KPU mengaplikasikan konsep web scrapping menggunakan script dengan bahasa pemrograman python. Data yang didapat dimasukkan kedalam file json yang kemudian diproses untuk insert ke database MySQL. Selanjutnya data tersebut digunakan pada sistem informasi yang dikembangkan. Gambar 3. 1 Diagram Use Case Sistem Informasi Pemilu Sistem informasi pemilu ini dibangun menggunakan Framework PHP yaitu Laravel 10. Setelah sistem informasi sudah dapat merepresentasikan kebutuhan berupa menampilkan surat suara, pencarian wilayah, daerah pemilihan, pencarian nama calon, serta detail profil calon legislatif maka praktikan melakukan deployment pada VPS ID Cloudhost dan menggunakan nama domain "lezen.id". Gambar 3. 2 Tampilan Salah Satu Surat Suara Beberapa hari menjelang pemilu, terjadi lonjakan traffic yang sangat drastic dan server menjadi sangat berat. Lonjakan traffic tersebut dipicu oleh viralnya salah satu tweet di twitter yang berisi tentang ajakan menggunakan lezen.id. Salah satu tweet pada 11 februari 2024 yang secara secara jelas mencantumkan link menuju lezen.id mendapat views 1,4 juta per 15 februari 2024. Sedangkan tweet

lain pada tanggal 12 februari 2024 yang memuat screenshot salah satu halaman detail profil pada website lezen.id per mendapat views 4,1 juta. Gambar 3. 3 Memori dan CPU mendapatkan load tinggi pada 12 – 13 Februari 2024 Untuk itu praktikan melakukan perubahan sistem, yakni mengganti web server yang digunakan dari yang sebelumnya menggunakan apache, menjadi nginx. Nginx dikenal sebagai webserver yang handal dalam menangani traffic tinggi, salah satunya karena memiliki fitur cache yang mengurangi beban server dikarenakan proses yang dilakukan pada level aplikasi. Praktikan juga memasang redis cache untuk meringankan proses yang dilakukan aplikasi. Gambar 3. 4 Dashboard Traffic Lezen id 24 jam sekitar tanggal 12-13 Februari 2024 Terlihat pada gambar di atas, traffic lezen.id pada 12-13 Februari 2024 menarik 123 ribu pengunjung dan hamper 9 juta request. B-3 Gambar 3. 5 Dashboard traffic 24 jam terakhir 13 februari – 14 februari 2024 Pada gambar diatas terlihat traffic 24 jam terakhir dari 13 februari 2024 pukul 8 pagi sampai 14 februari 2024 pukul 8 pagi mengalami peningkatan dibanding hari sebelumnya. Hal ini kemungkinan dikarenakan tingginya animo pada hari sebelum dan saat pemilihan. Tingginya traffic lezen.id kemungkinan besar berasal dari sosial media twitter / x dikarenakan jika dicek pada google search console yang merupakan sumber pintu masuk paling lumrah, jumlahnya cukup jauh berbeda dengan jumlah traffic pada dashboard. Gambar 3. 6 Dashboard Sumber Traffic Google Search tanggal 13 Februari Dari gambar dashboard grafik diatas terlihat bahwa klik paling tinggi hanya 64 ribuan. Gambar 3. 7 Tangkap Layar Cuitan dari akun @haikalstr 11 Februari 2024 Dari gambar di atas dapat dilihat salah satu cuitan di media sosial twitter pada tanggal 11 februari 2024 yang menarik 1.5 juta tayangan, disukai 23 ribu pengguna, 163 total balasan, disimpan oleh 10 ribu pengguna, dan diposulang oleh hampir 10 ribu pengguna. Dari segi user experience dilakukan pengujian untuk membandingkan nilai antara lezen.id dengan situs web info pemilu kpu menggunakan PageSpeed Insights. Pengujian perbandingan dilakukan pada halaman surat suara DPRD

kabupaten kota pada lezen id dengan halaman daftar calon tetap DPRD kabupaten kota pada Info Pemilu KPU didapatkan hasil berikut: Tabel 3.1 Hasil Pengujian User Experience (Core Web Vitals) Indikator lezen.id infopemilu KPU Keterangan Largest Contentful Paint (LCP) 1,8 detik 2,5 detik Lezen.id lebih baik Interaction to Next Paint (INP) 0,157 detik 0,253 detik Lezen.id lebih baik Cumulative Layout Shift (CLS) 0,04 0,01 Info Pemilu lebih baik First Contentful Paint (FCP) 1,7 detik 1,8 detik Lezen.id lebih baik First Input Delay (FID) 0,013 detik 0,019 detik Lezen.id lebih baik Time to First Byte (TTFB) 0,5 detik 0,6 detik Lezen.id lebih baik Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa dari 6 indikator pengujian, 5 diantaranya lezen.id memiliki nilai lebih baik daripada Info Pemilu KPU. Pada pengujian dengan indikator Largest Contentful Paint (LCP), Sisfo Pemilu lezen.id lebih cepat daripada Info Pemilu KPU.

4 LCP adalah metrik yang digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan bagi elemen terbesar di viewport untuk dirender sepenuhnya dalam layar.

7 Elemen terbesar ini bisa berupa gambar, video, atau blok teks yang signifikan.

LCP merupakan bagian dari Core Web Vitals yang didefinisikan oleh Google untuk menilai pengalaman pengguna dalam hal kecepatan pemuatan halaman web. Pada pengujian dengan indikator Interaction to Next Paint (INP), Sisfo Pemilu lezen.id lebih cepat daripada Info Pemilu KPU. INP adalah metrik yang mengukur responsifitas halaman web terhadap interaksi pengguna. INP adalah salah satu dari Core Web Vitals yang diperkenalkan oleh Google untuk menilai pengalaman pengguna dalam hal bagaimana cepat halaman merespons input pengguna, seperti klik, ketukan, atau input dari keyboard. Pada pengujian dengan indikator Cumulative Layout Shift (CLS), Info Pemilu KPU lebih baik daripada Sisfo Pemilu lezen.id . CLS adalah metrik yang mengukur stabilitas visual halaman web dengan menghitung jumlah total pergeseran tata letak yang terjadi selama masa hidup halaman. CLS adalah bagian dari Core Web Vitals yang didefinisikan oleh Google untuk menilai pengalaman pengguna dalam hal seberapa stabil halaman web saat dimuat dan digunakan. Hal ini

dikarenakan Lezen.id menggunakan mekanisme Client Side Rendering sedangkan Info Pemilu KPU menggunakan mekanisme Server Side Rendering. Pada pengujian dengan indikator First Contentful Paint (FCP), Sisfo Pemilu lezen.id lebih cepat daripada Info Pemilu KPU. FCP adalah metrik yang mengukur waktu dari saat pengguna mulai memuat halaman web hingga saat konten pertama (teks, gambar, non-background SVG, dan lain-lain.) muncul di layar. FCP adalah bagian dari Core Web Vitals yang didefinisikan oleh Google untuk menilai pengalaman pengguna dalam hal seberapa cepat halaman web mulai menampilkan konten yang berguna. Pada pengujian dengan indikator First Input Delay (FID), Sisfo Pemilu lezen.id lebih cepat daripada Info Pemilu KPU. FID adalah metrik yang mengukur waktu dari saat pengguna pertama kali berinteraksi dengan halaman (misalnya, ketika mengklik tautan, mengetuk tombol, atau menggunakan kontrol berbasis JavaScript khusus) hingga saat browser merespons interaksi tersebut. FID adalah bagian dari Core Web Vitals yang didefinisikan oleh Google untuk menilai pengalaman pengguna dalam hal interaktivitas dan responsivitas halaman web. Pada pengujian dengan indikator Time to First Byte (TTFB), Sisfo Pemilu lezen.id lebih cepat daripada Info Pemilu KPU. TTFB adalah metrik yang mengukur waktu yang berlalu dari saat pengguna atau klien (seperti browser web) membuat permintaan ke server hingga saat byte pertama respons dari server diterima oleh klien. TTFB adalah indikator penting dari performa server dan konektivitas jaringan.

B-5 3.3 Kendala Yang Dihadapi Selama pelaksanaan tugas, beberapa kendala yang dihadapi antara lain: 1. Masalah Teknis: Sumber data primer yaitu website KPU seringkali lambat dan tidak dapat diakses sehingga menghambat proses pengambilan data yang utuh. Juga data calon legislative yang berjumlah lebih dari 200 ribu, tersebar di 36 provinsi dengan lebih dari 2700 dapil memakan waktu yang lama. 2. Sedikitnya sumber daya dan waktu: Dikarenakan praktikan melakukan pekerjaan sendiri, bekerja dengan perangkat komputer yang sederhana, deadline pemilu yang cukup mepet, dan kesibukan lain menjadi tantangan tersendiri bagi praktikan untuk fokus.

Kendala Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa langkah yang telah dilakukan adalah: 1. Penanganan Teknis : Praktikan membuat beberapa skenario penanganan error berupa website lambat dan tidak bisa diakses, diantaranya dengan menggunakan mekanisme retry pada script pengambilan data yang dilakukan. Juga menggunakan konsep multithreading untuk meningkatkan kecepatan dalam mengambil jumlah data. Praktikan juga mengulang operasi pengambilan data secara berkala untuk menjamin data yang up to date.

2. Penanganan sumber daya dan waktu: Untuk mengakali sumber daya manusia, alat, dan waktu yang terbatas maka praktikan juga memanfaatkan waktu luang untuk riset seperti disela-sela kesibukan terutama di malam hari yang juga berkaitan dengan masalah teknis terkait load server KPU. 5 3.5

Pembelajaran Yang Diperoleh dari Kerja Profesi Dari penelitian ini, beberapa pembelajaran berharga yang diperoleh adalah: 1. Pengetahuan tentang sistem politik di Indonesia : Praktikan yang sebenarnya cukup jauh dari latar belakang keseharian praktikan dapat mengetahui tingkatan pemilihan calon legislatif dan mekanisme pemilu lebih dalam. 2. Pengembangan Diri Berkelanjutan: Hasil dari penelitian ini menjadi portofolio bagi praktikan dan meningkatnya jam terbang praktikan dalam mengembangkan produk sistem informasi dan dapat terus kompetitif di bidang pengembangan sistem informasi. 3. Pencapaian pribadi : Dijadikannya produk penelitian yang dilakukan praktikan sebagai salah satu alternatif dalam membantu masyarakat mengetahui dan menentukan calon legislator pilihannya, mendapatkan berbagai response yang kebanyakan positif, serta dimuat pada beberapa media online dan publikasi, tentunya menjadikan ini sebagai pencapaian pribadi bagi praktikan dan menjadi suatu wujud partisipasi praktikan pribadi untuk ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dalam bidang pengetahuan dan kesadaran memilih. BAB IV PENUTUP 4.1 Simpulan Dalam pelaksanaan kerja profesi ini, yang berfokus pada pengembangan sistem informasi politik di Indonesia, sejumlah pencapaian signifikan telah berhasil diraih. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan platform yang lebih terintegrasi, transparan, dan mudah diakses bagi masyarakat serta para pemangku kepentingan

politik. Melalui kerja keras dan penggunaan teknologi yang sesuai, praktikan berhasil mengembangkan sistem yang tidak hanya efektif dalam menyajikan informasi politik secara real-time tetapi juga meningkatkan partisipasi dan keterlibatan publik dalam proses politik. Meskipun dihadapkan dengan berbagai kendala seperti keterbatasan waktu, masalah teknis, pendekatan solusi yang inovatif memungkinkan penyelesaian proyek sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman ini menekankan pentingnya kerja yang efektif, adaptabilitas, dan pengembangan kompetensi berkelanjutan dalam menghadapi dinamika pekerjaan profesional.

4.2 Saran

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Untuk memastikan sistem informasi politik yang lebih andal dan efisien, investasi lebih lanjut dalam infrastruktur teknologi sangat diperlukan termasuk peningkatan server, perangkat lunak, dan keamanan data.
2. Perbaiki Tata Kelola Sistem Informasi: Sistem Informasi milik Lembaga penyelenggara pemilu seringkali tidak cukup handal dalam menangani animo masyarakat, juga kesalahan representasi data yang muncul dapat memicu kontroversi di tengah masyarakat.
3. Evaluasi: Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem dan melakukan pembaruan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.
4. Mendorong Partisipasi Publik: Mengimplementasikan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan publik dalam sistem informasi baik milik Lembaga penyelenggara pemilu maupun swadaya masyarakat, termasuk kampanye edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif.



REPORT #21900065

Results

Sources that matched your submitted document.

● IDENTICAL ● CHANGED TEXT

INTERNET SOURCE		
1.	2.09% www.kompas.id	●
	https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/05/penghitungan-suara-surat-sua..	
INTERNET SOURCE		
2.	0.83% diskominfo.kaltimprov.go.id	●
	https://diskominfo.kaltimprov.go.id/pemilu/5-lima-warna-berbeda-surat-suara-...	
INTERNET SOURCE		
3.	0.69% www.hukumonline.com	●
	https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikati...	
INTERNET SOURCE		
4.	0.55% upgraded.id	●
	https://upgraded.id/core-web-vitals	
INTERNET SOURCE		
5.	0.51% eprints.upj.ac.id	●
	https://eprints.upj.ac.id/id/eprint/4039/12/BAB%20III.pdf	
INTERNET SOURCE		
6.	0.46% repository.fe.unj.ac.id	●
	http://repository.fe.unj.ac.id/7711/1/Lap.%20PKL%20M.%20Teguh.pdf	
INTERNET SOURCE		
7.	0.3% support.google.com	●
	https://support.google.com/webmasters/answer/9205520?hl=id	
INTERNET SOURCE		
8.	0.15% ft.esaunggul.ac.id	●
	https://ft.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/2022/01/PEDOMAN-KERJA-PRAK...	